TOR EDSUS HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA

Rencana Terbit: 5 Juni 2022

TEMA: Komitmen Menyelamatkan Bumi

Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2022 akan menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk komitmen bersama-sama negara lain dalam berupaya menyelamatkan muka bumi.

Sebagai bentuk komitmen itu, pemerintah Indonesia terus mengawal agar masyarakat dunia meningkatkan kesadaran atas dampak negatif perubahan iklim. Upaya tersebut misalnya dilakukan Indonesia dalam isu-isu *green economy* yang didorong melalui G20.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya agar pandemi covid-19 berlalu melalui manajemen lingkungan yang bersih dan sehat. Terakhir, dari sisi penyelamatan lingkungan di wilayah pesisir juga menjadi penting dalam momentum isu Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Terkait hal itu, Media Indonesia bakal menyajikan edisi khusus Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni 2022.

1. Mengawal Perubahan Iklim

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim harus terus terjaga agar target pada Perjanjian Paris dapat tercapai dan tidak mempengaruhi PDB.

Hal ini misalnya akan jadi bahan pembicaraan mengenai *green economy* pada perhelatan G20 tahun ini di Indonesia, yakni membahas skenario pembangunan energi berbasis rendah karbon yang menghasilkan dari segi ekonomi.

Dengan begitu, komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% di tahun 2030 secara sendiri dan 41% dengan bantuan internasional dapat tercapai. Jika target *net zero emission* tercapai, PDB dunia akan turun sebesar 10% dengan Asia Tenggara merupakan salah satu daerah ataupun regional yang beresiko tinggi.

Selain itu berdasarkan *climate economic index*, juga menunjukkan Indonesia adalah negara yang sangat rentan, terutama ketika memasuki musim kemarau. Pemerintah pun khususnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah bersiap menghadapi kebakaran hutan.

Tulisan ini akan mengupas upaya dan program pemerintah dalam momentum mengawal terjadinya perubahan iklim yang melanda dunia saat ini, termasuk dalam mengawal isu *green economy* pada event Presidensi G-20 Indonesia.

Narasumber: Kemenko Perekonomian, Kementerian LHK, Pengamat lingkungan.

2. Lingkungan Sehat di Masa Transisi

Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan perubahan status pandemi di Indonesia harus diarahkan pada status terkendali ketika tidak terjadi penambahan kasus atau hanya terjadi di wilayah tertentu.

Indikator suatu wabah telah memasuki awal masa endemi adalah ketika kasus terus melandai selama periode waktu tertentu, sekitar lebih dari dua pekan. Jika kondisi tersebut terus terjaga selama tiga bulan, dapat dikatakan kondisi itu telah mengarah ke dalam status terkendali.

Karena itu, di masa transisi saat ini seharusnya mulai dibangun pola hidup bersih dan sehat untuk masyarakat, termasuk dengan pembangunan infrastruktur untuk memastikan lingkungan hidup yang lebih sehat, antara lain dengan menjalankan manajemen pengelolaan sampah yang benar dan sehat.

Tulisan ini akan mengupas upaya dan program pemerintah guna memastikan lingkungan tetap bersih sehat di masa transisi pandemi saat ini.

Narasumber: Kementerian LHK, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah.

3. Menjaga Kelestarian Pesisir

Sebagai bagian dari program penyelamatan lingkungan, program manajemen dan rehabilitasi terumbu karang atau coral reef rehabilitation and management program menjadi sesuatu yang sangat penting dilakukan untuk penyelamatan terumbu karang sekaligus menghidupkan perekonomian lokal.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Arifin Rudyanto menyatakan program strategis itu diinisiasi untuk perlindungan terhadap sumber daya pesisir khususnya terumbu karang yang memiliki 500 jenis dengan luas sekitar 25 ribu kilometer persegi di Indonesia.

Tulisan ini mengupas sejauh mana upaya pemerintah dalam penyelamatan lingkungan hidup khususnya di wilayah pesisir yang memiliki berbagai macam terumbu karang.

Narasumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian KKP, Kementerian LHK, pengamat lingkungan.